

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Berdasarkan pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Bank Syariah merupakan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan prinsip syariah, penyaluran atau alokasi yang dilakukan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat dan jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan syariah, disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Syariah sebagai intermediasi adalah untuk menyalurkan pembiayaan.<sup>2</sup> Cara Bank Syariah menyalurkan pembiayaan diatur oleh peraturan perbankan, karena hal ini berperan penting dalam pengelolaan likuiditas bank. Kinerja yang lancar dalam mengelola pembiayaan akan berdampak pada pencapaian target likuiditas, sehingga dapat meningkatkan kesehatan finansial bank.<sup>3</sup> Pembiayaan

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *UU NO 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, 2008.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, 1998.

<sup>3</sup> Indri Supriani and Heri Sudarsono, "ANALISIS PENGARUH VARIABEL MIKRO Dan MAKRO TERHADAP NPF PERBANKAN SYARIAH Di INDONESIA," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2018): 1.

merupakan produk yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam pelaksanaannya pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat tidak selamanya mengalami kelancaran, karena pada waktunya akan ada pembiayaan yang bermasalah dikarenakan beberapa alasan seperti faktor dari internal perbankan, nasabah hingga faktor eksternal. Bank syariah akan mengalami kerugian ketika bagi hasil yang diperoleh lebih kecil daripada operasional bank.

Semakin tinggi tingkat pembiayaan yang dilakukan bank syariah, maka akan semakin tinggi tingkat resiko mengenai pembiayaan bermasalah yang akan ditanggung oleh perbankan syariah yang bersangkutan.<sup>4</sup> Salah satu indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah dilihat pada tingkat *Non Performing Financing*. NPF ialah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah, pada mulanya selalu diawali dengan wanprestasi, yaitu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang tertera di perjanjian pembiayaan.<sup>5</sup> Besar kecilnya NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan

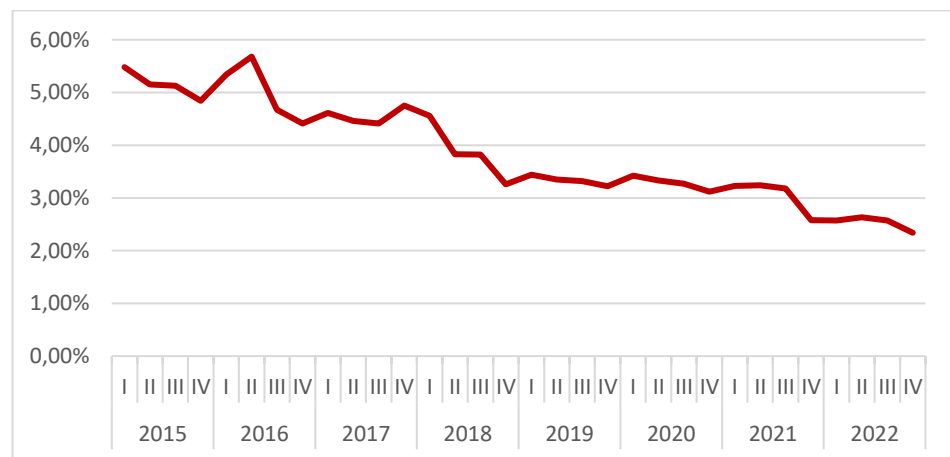
---

<sup>4</sup> Andrianto, Didin Fatihudin, and Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*, ed. Qiara Media, 1st ed. (Cv. Penerbit Qiara Media, 2019). hlm. 28

<sup>5</sup> Khatibul Umam and Setiawan Utomo, Budi, *Perbankan Syariah : Prinsip Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Jakarta : Rajawali Pers 2017, 2017). hlm. 206

yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.<sup>6</sup>

Adapun perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) selama periode penelitian ini di jelaskan pada gambar 1.1 sebagai berikut:



Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK 2015-2022

**Gambar 1. 1 Grafik NPF 2015-2022**

Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2022 NPF mengalami fluktuasi. Titik terburuk terdapat pada triwulan ke II di tahun 2016 yang mencapai angka lebih dari 5%. Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 bahwasanya bank memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha jika rasio pembiayaan bermasalah mencapai lebih dari 5% dan bank dikatakan tidak sehat ketika rasio NPF mencapai lebih dari 5%.<sup>7</sup>

Menurut Khotibul Umam, meskipun perbankan merupakan sektor yang *strictly well regulated*, tetapi kredit macet masih dapat terjadi diantaranya dapat

<sup>6</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012). hlm. 153

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.03/2017 Tentang Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum," *Otoritas Jasa Keuangan* (2017): 7, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-Bank-Umum/SAL\\_POJK\\_15\\_Exit\\_Policy\\_Bank\\_Umum.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-Bank-Umum/SAL_POJK_15_Exit_Policy_Bank_Umum.pdf).

disebabkan karena: (1) kesalahan appraisal; (2) membiayai proyek dari pemilik/terafiliasi; (3) membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu; (4) dampak makro ekonomi/ *unforecasted variable*; (5) kenakalan nasabah.<sup>8</sup>

Penyebab pembiayaan bermasalah sendiri bisa saja diakibatkan dari sisi internal serta sisi eksternal. Dari sisi eksternal bisa disebabkan oleh faktor-faktor makroekonomi seperti kondisi perekonomian, perubahan – perubahan peraturan, inflasi, GDP, kurs, BI Rate serta lain sebagainya.<sup>9</sup> Sedangkan dari sisi internal berasal dari faktor-faktor internal nasabah dan bank seperti kurang tajam dalam menganalisis maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan lain sebagainya.

Pada hal ini penulis memasukkan variabel yang merupakan salah satu indikator dari kondisi perekonomian. Variabel tersebut terdiri dari fenomena kenaikan harga barang atau jasa secara bersamaan dan terus menerus. nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing, pendapatan perkapita masyarakat suatu negara. Dan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dimana pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh pendapatan setiap individunya yang merupakan salah satu indikator Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu tingkat PDB dipengaruhi oleh laju inflasi dan nilai tukar mata uang (kurs), ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus menerus yang mempengaruhi produk domestik bruto maka untuk mengendalikan inflasi

---

<sup>8</sup> Umam and Utomo, Budi, *Perbankan Syariah : Prinsip Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. hlm. 207

<sup>9</sup> Hermawan Soebagio, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Umum Komersial (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan Di Indonesia),” 2005.

tersebut dibutuhkan kebijakan moneter melalui kebijakan BI Rate. Adapun perkembangan Inflasi, Kurs, BI rate dan PDB selama periode penelitian dijelaskan pada tabel 1.1 berdasarkan data dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Perkembangan Inflasi, Kurs, BI rate, dan PDB 2015-2022**

Tahun	Triwulan	Inflasi	Kurs	BI Rate	PDB	NPF
2015	I	6.38%	13,149.00	7.50%	27,281.81	5.48%
	II	7.26%	13,399.00	7.50%	28,679.48	5.15%
	III	6.83%	14,730.00	7.50%	29,906.45	5.13%
	IV	3.35%	13,864.00	7.50%	29,395.59	4.84%
2016	I	4.45%	13,342.00	6.75%	29,292.69	5.34%
	II	3.45%	13,246.00	6.50%	30,735.37	5.68%
	III	3.07%	13,063.00	5.00%	32,050.19	4.67%
	IV	3.02%	13,503.00	4.75%	31,939.04	4.41%
2017	I	3.49%	13,388.00	4.75%	23,781.46	4.61%
	II	3.49%	13,390.00	4.75%	24,735.13	4.46%
	III	3.49%	13,559.00	4.25%	25,522.97	4.41%
	IV	3.49%	13,616.00	4.25%	25,089.72	4.75%
2018	I	3.45%	13,825.00	4.25%	24,986.98	4.56%
	II	3.12%	14,476.00	5.25%	26,038.53	3.83%
	III	2.88%	15,004.00	5.75%	26,843.32	3.82%
	IV	3.13%	14,553.00	6.00%	26,389.70	3.26%
2019	I	2.48%	14,315.00	6.00%	26,251.81	3.44%
	II	3.28%	14,212.00	6.00%	27,354.14	3.35%
	III	3.39%	14,245.00	5.25%	28,188.13	3.32%
	IV	2.72%	13,970.51	5.00%	27,697.48	3.22%
2020	I	2.96%	16,448.84	4.50%	27,030.27	3.42%
	II	1.96%	14,373.51	4.50%	25,897.69	3.33%
	III	1.42%	14,992.59	4.00%	27,204.81	3.27%
	IV	1.68%	14,175.53	3.75%	27,097.22	3.12%
2021	I	1.37%	14,644.86	3.50%	26,844.48	3.23%
	II	1.33%	14,568.48	3.50%	27,730.67	3.24%
	III	1.60%	14,378.54	3.50%	28,164.95	3.18%
	IV	1.87%	14,340.35	3.50%	28,460.69	2.58%
2022	I	2.64%	14,420.75	3.50%	28,193.30	2.57%
	II	4.35%	14,922.24	3.50%	29,244.58	2.63%
	III	5.95%	15,323.24	4.25%	29,779.73	2.57%
	IV	5.51%	15,809.66	5.50%	29,886.37	2.34%

Sumber : Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Inflasi, Kurs, BI rate, dan PDB mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Inflasi merupakan kenaikan harga umum secara terus menerus, laju inflasi yang tinggi akan berakibat negatif terhadap suatu perekonomian secara keseluruhan.<sup>10</sup> Hal tersebut akan memperburuk risiko pembiayaan yang dialami perbankan syariah, karena pengembalian pembiayaan dari nasabah akan ikut menyusut yang diakibatkan nasabah kesulitan membayar kewajibannya kepada pihak bank dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh inflasi, dari terjadinya kenaikan inflasi akan memicu naiknya risiko pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah yang berdampak kepada rasio NPF yang tinggi. Itu artinya hubungan antara Inflasi dan NPF adalah positif. Berdasarkan pengamatan pada tabel diatas menunjukkan perkembangan inflasi dari tahun 2015-2022 mengalami naik turun dari setiap triwulannya, tetapi pada triwulan II 2016, triwulan I 2019, dan triwulan II 2021 inflasi mengalami penurunan namun NPF pada triwulan tersebut cenderung naik.

Dampak dari peningkatan inflasi biasanya direspon Bank Indonesia dengan meningkatkan BI Rate. BI Rate adalah suku bunga acuan bagi kebijakan moneter. Kenaikan BI Rate akan meningkatkan biaya pembiayaan yang berupa margin pembiayaan, sehingga nilai pengeluaran pembiayaan akan menurun. BI Rate bisa menjadi acuan bagi tinggi rendahnya jumlah pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Tidak hanya itu adanya kenaikan suku bunga yang tidak wajar akan menyulitkan dunia usaha untuk membayar beban bunga dan kewajiban, karena suku bunga yang tinggi akan menambah beban bagi

---

<sup>10</sup> Eko Sudarmanto et al., *Teori Ekonomi: Mikro Dan Makro, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2021. hlm. 190

Perusahaan sehingga secara langsung akan mengurangi profit Perusahaan.<sup>11</sup> Berdasarkan pengamatan pada tabel diatas menunjukkan perkembangan BI rate dari tahun 2015-2022 mengalami naik turun dari setiap triwulannya, tetapi pada triwulan II 2016 mengalami penurunan, triwulan I 2019, dan triwulan II 2021 BI rate tidak mengalami penurunan maupun kenaikan namun NPF pada triwulan tersebut cenderung naik. Tidak hanya BI rate yang bisa menjadi acuan bagi tinggi rendahnya pembiayaan bermasalah, kurs sebagai faktor eksternal bisa menjadi salah satu pemicu naik turunnya pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Kurs merupakan nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Naik turunnya nilai rupiah terhadap mata uang asing akan mempengaruhi naik turunnya daya beli masyarakat karena apabila turunnya nilai rupiah akan berdampak pada kenaikan harga relatif. Berdasarkan pengamatan pada tabel diatas menunjukkan perkembangan kurs dari tahun 2015-2022 mengalami naik turun dari setiap triwulannya, tetapi pada triwulan II 2016, triwulan I 2019, dan triwulan II 2021 kurs mengalami penurunan namun NPF pada triwulan tersebut cenderung naik. Fenomena tersebut adanya ketidaksesuaian dengan teori yang dijelaskan.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan perhitungan produk yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu untuk mengetahui kemampuan negara tersebut.<sup>12</sup> PDB memberikan representasi mengenai kondisi suatu negara apakah negara tersebut perekonomiannya mengalami kemajuan. Ketika PDB suatu negara tinggi maka bisa dikatakan pendapatan rata-rata

---

<sup>11</sup> Boediono, *Ekonomi Moneter Edisi Ketiga*, 3rd ed. (Yogyakarta: BP FE Universitas Gajah Mada, 72AD). hlm. 72

<sup>12</sup> Sudarmanto et al., *Teori Ekonomi: Mikro Dan Makro*. hlm. 99

masyarakat negara tersebut juga tinggi. Peningkatan pertumbuhan PDB dapat dijadikan sebagai acuan bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan sehingga pertumbuhan tetap terjaga. Apabila PDB mengalami peningkatan maka rasio NPF akan menurun. Itu artinya hubungan antara PDB dan NPF adalah negatif. Berdasarkan pengamatan pada grafik diatas PDB mengalami naik turun dari setiap triwulannya, tetapi pada triwulan II 2016 PDB mengalami kenaikan namun NPF pada triwulan tersebut ikut naik, triwulan I dan II 2021 PDB mengalami peningkatan namun NPF pada triwulan tersebut cenderung naik.

Faktor yang mempengaruhi NPF selain dari faktor internal bank dan debitur ada pula faktor kondisi lingkungan alam, seperti bencana alam. Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang sulit diprediksi seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan lain sebagainya, merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>13</sup> Pada akhir tahun 2019 sampai tahun 2022 terjadi bencana wabah covid 19 di Indonesia yang mempengaruhi perekonomian nasional. Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia berkontraksi. Dampak Pandemi Covid-19 nampaknya berimbas pada semua sektor, akibat dari beberapa kebijakan pemerintah yang ditetapkan pada waktu tersebut. Salah satu kebijakan pemerintah ialah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia yang bertujuan untuk membatasi penyebaran wabah virus covid 19 yang diakibatkan dari kegiatan masyarakat. Dampak dari setiap pembatasan kegiatan masyarakat berdampak terhadap

---

<sup>13</sup> Trisadini P Usanti, Abd Shomad, and Restu Damayanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).



melambatnya laju ekonomi yang di ukur dengan produk domestik bruto bahkan bertumbuh negatif.<sup>14</sup>

Beberapa penelitian yang membahas permasalahan ini sudah dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arfan Harahap dan Anjur Perkasa Alam yang menjelaskan secara parsial variabel nilai tukar/ kurs mempunyai dampak negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* serta variabel suku bunga/BI Rate mempunyai dampak positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* akan tetapi variabel inflasi mempunyai dampak negatif serta tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing*.<sup>15</sup> Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tasya Feby Windasari dan I Putu Gede Diatmika menjelaskan bahwa variabel inflasi dan kurs rupiah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan latar belakang dan penemuan gap diatas, terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti mengenai pengaruh makroekonomi terhadap *Non Performing Financing*, dengan kebaruan yang diusulkan peneliti yaitu penggunaan periode pada tahun 2015-2022 dan penggunaan *Error Corection Model* sebagai metode analisis data. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH MAKROEKONOMI TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2022”**.

---

<sup>14</sup> Robertus Andrianto, “PPKM Berjalan, Dampaknya Ke Ekonomi Indonesia,” *CNBC Indonesia*, last modified 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220209105231-17-313980/ppkm-level-3-berjalan-ini-dampaknya-ke-ekonomi-indonesia>.

<sup>15</sup> Muhammad Arfan, “Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga, Margin Bagi Hasil Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah,” *Jurnal Health Sains* 1, no. 3 (2020): 196–206.

<sup>16</sup> Tasya Feby Windasari & I Putu Gede Diatmika, “Pengaruh Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Skor Tukar Rupiah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018,” *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 12, no. 2 (2021): 568–579.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya yaitu;

1. Apakah Inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2022?
2. Apakah Kurs dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2022?
3. Apakah BI rate dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2022?
4. Apakah PDB dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2022?
5. Apakah Inflasi, Kurs, BI rate, PDB dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu untuk :

1. Mengetahui pengaruh Inflasi dalam jangka pendek dan jangka Panjang terhadap NPF di Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2022
2. Mengetahui pengaruh Kurs dalam jangka pendek dan jangka Panjang terhadap NPF di Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2022
3. Mengetahui pengaruh BI rate dalam jangka pendek dan jangka Panjang terhadap NPF Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2022

4. Mengetahui pengaruh PDB dalam jangka pendek dan jangka Panjang terhadap NPF Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2022
5. Mengetahui pengaruh inflasi, kurs, bi rate, PDB dalam jangka pendek dan jangka Panjang terhadap NPF Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2022

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi atau perbandingan penelitian selanjutnya di bidang Makroekonomi dan Perbankan khususnya untuk mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi mengenai korelasi antara pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor makroekonomi.

2. Kegunaan bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan serta cakrawala keilmuan khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi pembaca.

3. Kegunaan bagi umum

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan mengenai makroekonomi, khususnya mengenai korelasi antara pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor makroekonomi.